

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Dana BOS merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada seluruh siswa SD dan SMP serta mengeliminasi masyarakat miskin yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena kekurangan biaya. Program pemerintah yang memberikan biaya materi kepada setiap sekolah dasar sebagai bagian dari program wajib belajar. Program BOS bertujuan untuk membebaskan dana pendidikan sesuai dengan kebijakan intinya. Secara khusus, BOS bertujuan untuk membebaskan semua siswa miskin. Pendidikan dasar 9 tahun di tanggung dari beban biaya operasional sekolah. Kecuali, untuk proyek percontohan internasional dan domestik. Mengurangi biaya sekolah dan operasional Pendidikan siswa sekolah swasta. BOS juga bertujuan untuk menekan angka putus sekolah, meningkatkan APK siswa, dan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa yang kurang mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Ringkasnya, BOS dapat menjadi alat penting untuk menambah akses terhadap layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas, sehingga antar kelompok masyarakat dan daerah (perkotaan-pedesaan) berdasarkan tingkat pendapatan (miskin dan kaya). Akan ada

kesenjangan dalam penerimaan sekolah melalui sistem pengelolaan yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pencerahan Khusus Penatausahaan Dana BOS Sekolah Reguler Pasal 1 ayat (1) ditegaskan Bahwa “Dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih dikenal dengan Dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendukung pengeluaran non pegawai satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendukung berbagai program kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mengacu kepada penjelasan tersebut, maka sangat jelas bahwa Dana BOS adalah realisasi konkrit dari pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendanaan untuk setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan operasional akademik maupun non akademik pada setiap satuan pendidikan tersebut.

Dana BOS di salurkan sesuai dengan banyaknya peserta didik di sekolah. Untuk saat ini dana Bantuan Operasional Sekolah terbagi menjadi dua bagian, terdiri dari dana BOS pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana BOS pertama dikeluarkan pada Juli 2005. Dana BOS adalah program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung seluruh sekolah yang berada di Indonesia. Bantuan pendidikan akan diberikan sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar. Dana BOS dapat dipergunakan untuk melakukan berbagai program sekolah. Penyediaan sarana pendidikan dan pembelajaran,

pembayaran gaji guru, pengembangan perpustakaan, dll. Program BOS pada awalnya dibuat untuk meningkatkan akses pendidikan di masyarakat. Dengan meningkatnya anggaran pemerintah, tujuan program BOS juga meningkat dan kini ditujukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa. Semua sekolah mempunyai hak atas dana bos selama sekolah tersebut terus melakukan pengkinian data sekolah menggunakan platform “Data Pokok Pendidikan” (Dapodik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk sekolah swasta, harus bisa membuktikan bahwa sekolah tersebut mempunyai izin pembayaran/operasi dan sedang melaksanakan proses pembelajaran aktif.

Dalam mekanisme pembayaran yang baru, salah satu faktor yang menentukan ketepatan waktu pembayaran dana yakni kecepatan proses verifikasi rekening tabungan sekolah. Untuk mendukung proses ini, sekolah harus memastikan bahwa rekening yang terdaftar pada sistem BOS Salur sesuai dengan rekening yang tertulis pada sistem bank. Kebijakan Dana BOS diadengan kenaikan harga BBM Terhubung ke pemerintah pada tahun 2005 Pengurangan subsidi BBM. Secara umum, program Dana BOS sudah dimulai. Sebagai cara meningkatkan akses masyarakat khususnya pelajar Pendidikan berkualitas di keluarga miskin dan kurang mampu Kerangka kerja untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Saat memberikan bantuan operasional sekolah bertujuan untuk mengurangi beban keuangan Orang miskin agar bisa melanjutkan pendidikan. Pembangunan negara adalah menyediakan dana

Dukungan manajemen sekolah bisa dijalankan secara adil dan tepat Siswa yang memenuhi syarat untuk tujuan, yaitu bantuan operasional sekolah artinya, seorang siswa dengan kemampuan yang kurang lebih. Memberi perlengkapan sekolah yang gagal sama dengan membuang uang karena mungkin ada penyimpangan untuk mencegah hal ini dalam hal ini, masyarakat perlu memantau pelaksanaan dan sosialisasi BOS. Melihat tujuan dari pendanaan BOS, ini tentang penambahan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui pertumbuhan wajib Belajar 9 Tahun yang perlu diketahui berapa peran sumber daya utama untuk peningkatan kualitas edukasi sendiri apakah keberadaan BOS akan mendanai satu udara segar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kegiatan pemerintah untuk menolong pengadaan Biaya operasional sekolah non pribadi yaitu BOS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memimpin Program Bantuan Operasional Sekolah, yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan dana BOS secara manual, dan penggunaan dana BOS yang diimpor oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dideklarasikan pada tahun 1945 ini adalah untuk mendidik kehidupan masyarakat, dan untuk tujuan itu semua warga negara indonesia berhak atas pendidikan yang bermutu sesuai dengan

minat dan kepentingannya bakat yang mereka miliki, tanpa diskriminasi status sosial, ras, suku atau agama. Karena pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan, bangsa Indonesia memiliki kecakapan hidup karena mereka memiliki kemampuan kenali, atasi, dan atasi masalah dengan diri sendiri dan lingkungan Anda masyarakat modern yang dibentuk oleh nilai-nilai borjuis dan pancasila. Saat itu, negara kita memiliki jutaan anak usia sekolah, dan itu masih terjadi. Saya tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah. Sekitar 1,5 juta di antaranya adalah anak-anak pada usia 13-15, ia terpaksa putus sekolah. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah pemerintah kemendiknas, Penyaluran Bantuan dan Fasilitas melalui Program BOS (Asisten manajemen sekolah). Penerima BOS lebih disukai oleh siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta. Termasuk membantu siswa putus sekolah biaya kuliah dan pengumpulan tidak memungkinkan. Jika masih ada sisa dana BOS akan digunakan untuk membantu mahasiswa lain. Untuk sekolah itu jika tidak ada siswa miskin, dana BOS akan digunakan untuk menggalang dana semua siswa untuk dapat mengurangi biaya / donasi yang terkumpul orang tua memiliki jumlah minimum dana BOS yang akan diterima sekolah.

Berbicara tentang Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pemerintah yang tujuan utamanya adalah menyediakan dana untuk biaya operasional sekolah dan operasional luar sekolah bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Salah satu cara pemerintah mendukung program pendidikan di Indonesia adalah melalui bantuan

operasional sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasional non pegawai adalah standar biaya yang diperlukan untuk mendanai operasional non pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari seluruh dana pendidikan agar pendidikan unit bisa. Program kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Namun, ada beberapa jenis tabungan dan pembiayaan profesional yang diperbolehkan dibiayai dengan uang BOS.

Menurut juknis, program BOS dapat membantu dan mendorong masyarakat untuk mengenyam pendidikan minimal setingkat SLTA. Selain itu, pemerintah ingin mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945, yaitu “Pendidikan untuk Kehidupan Bangsa”. Melihat kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan dana bantuan operasional kepada sekolah-sekolah yang menyasar semua sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri (SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMALB, SMK) dan segala macam kelompok berbasis daerah. di wilayah tersebut. masyarakat terpencil, masyarakat miskin, dll. Program pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengembangan kualitas diinginkan dalam kendali suatu lembaga agar berjalan dengan satu tujuan, meningkatkan biaya yang dibawa, terutama cara untuk meningkatkan biaya yang dibawa dalam suatu

kelompok akademik sehingga perlu dikembangkan dalam meningkatkan kualitas sekolah yang memuaskan dan produktivitas di seluruh negeri untuk menjawab perkembangan medis dan teknologi. Terhadap kajian perilaku dan evaluasi menyeluruh terhadap transformasi cara hidup dan teknologi di berbagai bidang yang perlu ditanggapi dengan baik dalam mempersiapkan dan menumbuhkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Menurut Popisupiatin, dikutip melalui Nur Zanin, ia mendefinisikan rendahnya tingkat kepuasan sekolah di Indonesia ditandai dengan banyaknya variasi lulusan yang tidak dapat diserap melalui persekolahan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan. Oleh karena itu, Pemerintah mengadakan program Dana BOS.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan ada satu sumber dana BOS di SD Negeri 1 Kawunggirang khususnya BOS Reguler. BOS Reguler adalah sumber dana dari Pemda Majalengka yang berasal dari APBD Majalengka yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang memiliki cukup uang untuk membantu pendidikan anak. BOS reguler diberikan kepada sembilan puluh tiga siswa-siswi kurang mampu di SD Negeri 1 Kawunggirang. Asisten BOS diperuntukkan bagi siswa yang sebelumnya terdaftar di sekolah asal sebagai siswa kurang mampu. Anda harus menunjukkan kartu BPJS atau SKTM (Surat Keterangan Disabilitas) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat.

Dana BOS reguler diberikan dalam bentuk item guru, termasuk ATK dan atribut sekolah. Distribusi berlangsung setiap tahun pada kuartal terakhir bulan terakhir Oktober-Desember. Banyaknya jumlah fasilitas yang diperoleh melalui sarana siswa yang tidak memiliki cukup uang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa untuk mengganti fasilitas mereka yang telah rusak atau usang. Liputan ini sudah ada selama dua tahun di SD Negeri 1 Kawunggirang dari tahun ajaran 2021-2022 dan 2022-2023 akan tetapi pada tahun ini belum terlaksana pembagiannya. Kami berharap dukungan ini akan menyelesaikan masalah siswa menggunakan peralatan sekolah dan membuat mereka nyaman.

BOS merupakan simpanan panduan yang diperoleh dari pemerintah pusat setempat, dana ini khususnya diambil melalui APBN yang diperuntukkan kepada semua siswa untuk mengurangi beban dalam membiayai pelatihan di sekolah. Dana BOS ini nantinya akan dibagikan untuk 93 orang siswa, Jumlah dana BOS untuk masing-masing siswa pada tahun 2021 mendapat 800.000 ribu, sementara itu pada tahun 2022 sebesar 920.000 ribu, dana tersebut tidak digunakan dalam bentuk uang untuk transportasi siswa, tetapi cadangan BOS reguler digunakan untuk menutupi biaya pendidikan semua siswa. Semua biaya pembelajaran untuk belajar siswa di SD Negeri 1 Kawunggirang telah ditetapkan dengan memanfaatkan cadangan BOS. Salah satu variabel pencapaian dalam memanfaatkan program BOS adalah hebatnya para pengurus BOS.

Pentingnya para pelaksana yang baol akan benar-benar membantu terlaksananya program BOS dan sekolah dapat menggunakan aset BOS untuk menggarap lingkungan sekolah secara nyata dan produktif. Kesalah pahaman penatausahaan BOS dari metodologi untuk membuat jatuh tempo, pemanfaatan, dan fokus pada aset BOS dapat menyebabkan ketidak sesuaian dengan petunjuk teknis dengan arah khusus untuk pemanfaatan cadangan BOS.

Tabel 1.1 Anggaran BOS di SD Negeri 1 Kawunggirang dari Tahun
2021-2022

Bantuan Operasional Sekolah			
Laporan Keuangan Triwulan I			
Bulan	Penerimaan	pengeluaran	Keterangan
Januari	-	6.333.000	- Jenis Belanja Pegawai
Februari	-	6.333.000	- Jenis Belanja Barang dan Jasa
Maret	-	6.333.000	- Jenis Belanja Modal

Sumber: RKAS Tahun Ajaran 2021-2022, (diolah peneliti)

Berdasarkan hasil persepsi didapat data terkait subsidi BOS di SD Negeri 1 Kawunggirang. Penggunaan subsidi BOS di SD Negeri 1 Kawunggirang mengacu pada arahan khusus pemakaian dana BOS yang

diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, pencairan dana BOS dari pusat mengalami keterlambatan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Sehingga pengeluaran dana tersebut menggunakan dana talang. Untuk menutupi pengeluaran rutin bulanan biasanya di tutupi dengan pinjaman atau dana talang yang bersumber dari uang pribadi pihak sekolah. Adanya anggaran pengeluaran tiap bulannya itu tergantung kebutuhan pihak sekolah di antaranya pembayaran listrik, keperluan sarana dan prasarana lainnya. Untuk pembayaran listrik bisa naik bisa turun tergantung pemakaian sekolah tersebut. Apalagi tarif yang ditetapkan untuk kantor yayasan dan peningkatan kecakapan pendidik dalam pedoman khusus pemanfaatan BOS dari otoritas publik masih dipandang kecil, yakni hanya 15%, turun dari tahun sebelumnya. Maka otoritas publik perlu membangun tingkat peruntukan subsidi BOS, terutama untuk kemajuan panggilan pertunjukan dan peningkatan kerangka kerja kantor yang membantu pengalaman yang berkembang menjadi lebih bagus. Pihak sekolah menyampaikan keluhan terlambatnya alokasi dana BOS yang akan diterima oleh sekolah. Ini terjadi saat akhir Desember 2021, keseimbangan terakhir cadangan BOS adalah Rp. 20.000.000,00 padahal kebutuhan sekolah lebih besar dari jumlah tersebut. Sekolah harus lebih sedikit mendapatkan fasilitas olahraga karena dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

Penyaluran yang diarahkan pada SD Negeri 1 Kawunggirang dalam hal pemanfaatan aset BOS dapat dikatakan sudah sangat maju. Menjelang

awal dan akhir tahun diadakan rapat Komite Sekolah secara keseluruhan, yang dihadiri oleh dewan pengawas sekolah, wali/penjaga siswa dan dihadiri oleh kepala sekolah dan instruktur. Pelaksanaan arisan untuk memadukan pengaturan keuangan yang terkait dengan RKAS dan RAB BOS untuk anggaran tahun yang akan datang dan untuk mendistribusikan perolehan simpanan BOS para pengurus yang sudah diselesaikan kepada para guru. Namun, terjadi kendala dalam pendistribusiannya kepada para guru. Sekolah hanya memberikan selebar yang telah berubah menjadi laporan pemakaian cadangan BOS ketika digelar rapat keseluruhan Komite/Pengurus Sekolah. Akibatnya, penggunaan dan sistem kelola cadangan BOS tidak benar dengan arahan khusus pemanfaatan BOS. Selanjutnya, arti penting dari pemeriksaan ini adalah sekolah yang mendapatkan cadangan BOS diharapkan memiliki pilihan untuk mengawasi aset BOS sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman khusus sehingga tujuan awal dan manfaatnya aset BOS dapat terlaksana dan tepat kepada yang membutuhkan.

Dari penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dirumuskan berdasarkan pengamatan dan fakta yang didapat dari SD Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka :

1. Besarnya dana BOS dinilai masih belum mencukupi kebutuhan biaya operasional di sekolah dalam upaya peningkatkan kualitas guru dan infrastruktur di SD Negeri 1 Kawunggirang.
2. Alokasi dana BOS untuk infrastruktur dan pengembangan profesi guru dinilai masih rendah.
3. Publikasi hanya dimungkinkan dengan adanya dokumen penggunaan dana BOS dalam rapat pleno Komite Sekolah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Prinsip Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana Prinsip Transparansi Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka?

3. Bagaimana Prinsip Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka?
4. Bagaimana Prinsip Partisipasi Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Prinsip Manajemen Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Prinsip Transparansi Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka.
3. Untuk Mengetahui dan Memahami Prinsip Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka.
4. Untuk Mengetahui dan Memahami Prinsip Partisipasi Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang dapat digunakan sebagai sumber perspektif bagi para peneliti dan membantu dalam memperluas informasi dan pemahaman, khususnya mengenai isu-isu yang terkait dengan isu-isu yang berbeda dalam penyelenggaraan program Dana BOS.

Manfaat praktis

Kepada peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai salah satu sarana untuk menerapkan spekulasi yang didapat selama melakukan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pandangan keilmuan dan informasi yang lebih mengenai Manajemen keuangan bantuan operasional sekolah.

Kepada lembaga/instansi yang diteliti

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai seberapa berhasilnya pengelolaan dan manfaat yang dirasakan dari program BOS seperti yang tertulis pada petunjuk teknis

penggunaan dan pengelolaan BOS Tahun 2022.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami Prinsip Manajemen keuangan terdiri dari berbagai prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas, dijelaskan beberapa prinsip penting saja, diantaranya

1) Transparansi

Sebagai transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan berarti pengelolaan dalam suatu kegiatan di lembaga, misalnya dalam keuangan lembaga keuangan. Dalam mengungkapkan sumber dan jumlah dana, perincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas untuk membuat prospek lebih mudah untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan diperlukan untuk meningkatkan dukungan atau partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan semua program di lembaga pendidikan. Selain itu, transparansi dapat membangun rasa saling percaya antara pemerintah, masyarakat, orang tua dan warga sekolah dengan menyediakan informasi dan memastikan akses mudah ke informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua pendidik dan orang tua siswa, seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), rencana aktivitas kegiatan dan anggaran sekolah

(RKAS). Dokumen-dokumen ini akan ditampilkan di papan buletin sekolah. Perencanaan Bisnis Anggaran (RBA) di Perguruan Tinggi dapat diakses secara online (Ratnaningtyas, K. & Setiyani, R., 2017). Oleh karena itu, siapapun yang membutuhkan informasi pengelolaan keuangan pendidikan dapat dengan mudah mengetahui berapa banyak uang yang diterima suatu institusi dan digunakan untuk apa saja. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan pendidikan.

2) Akuntabilitas

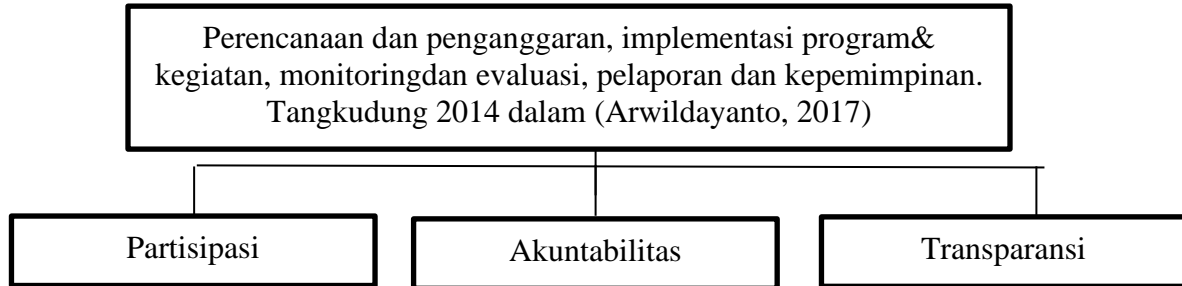
Akuntabilitas adalah suatu kondisi di mana seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka oleh orang lain. Hal ini didasarkan pada kualitas kinerja mereka dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab. Akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan berarti penggunaan dana lembaga pendidikan dapat diperbandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Tujuan akuntabilitas lembaga pendidikan adalah untuk menilai kinerja lembaga pendidikan dan kepuasan pemangku kepentingannya terhadap layanan pendidikan yang diberikan, melibatkan dalam layanan pendidikan, dan menggambarkan komitmen penyelenggara pendidikan untuk pemangku kepentingan mereka untuk pengawasan yang dikumpulkan dari pemerintah, orang tua dan masyarakat

Dengan adanya akuntabilitas, lembaga pendidikan dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana membelanjakan uang mereka. Adapun pihak-pihak yang menginginkan akuntabilitas antara lain orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Pengelola pendidikan perlu menyampaikan laporan keuangannya kepada pemangku kepentingan pendidikan secara berkala.

3) Partisipasi

Partisipasi yaitu kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa proses partisipatif, kualitas layanan, dan hasil pendidikan semuanya setara. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan. Hal ini karena partisipasi dalam kegiatan ini mendorong orang untuk berpikir, merasa dan bertindak dengan cara mengarah pada tujuan dan bertanggung jawab atas keberhasilan mereka. Sumber daya yang dipermasalahkan dapat berupa tenaga, pikiran, waktu, atau biaya yang dikeluarkan.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Arwildayanto (2017)

G. Proposisi

Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kawunggirang Kabupaten Majalengka dapat dikatakan baik apabila sudah sesuai dengan teori Manajemen Keuangan Menurut tangkudug (2014). apabila keterbukaan mengenai anggaran keuangan terhadap dana bantuan operasional sekolah yang bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan anggaran.